

## PENGARUH KORUPSI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI STUDI EMPIRIS NEGARA-NEGARA ASIA PASIFIK

Sri Nawatmi  
Universitas Stikubank  
srinawatmi@yahoo.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk menganalisis digunakan data pooling. Jumlah data *cross-section* adalah 14 negara di Asia Pasifik dan data *time-series* adalah sembilan tahun. Dari hasil uji *redundant fixed effect test* dan *correlated random effects-Hausman test* serta pertimbangan teknis didapatkan model terbaik adalah *fixed effect model*. Berdasar hasil regresi, korupsi memiliki signifikansi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi 12 negara di Asia Pasifik. Artinya, korupsi (Corruption Perception Index/CPI) bukan menjadi *grease of wheel* atau pelicin roda perekonomian negara-negara tersebut. Sedangkan variabel lain yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah *foreign direct investment* dan pengeluaran pemerintah untuk kesehatan. Hasil analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa dari 12 negara yang dijadikan obyek penelitian ternyata hanya lima negara yang korupsinya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu dua negara positif signifikan (Jepang dan Korea Selatan) dan sisanya (Brunei Darusalam, Timor Leste dan Kamboja) negatif signifikan.

Kata kunci: IPK, pertumbuhan ekonomi, data pooling, fixed effect model dan grease of wheel.

### Abstract

*The research want to analysis about corruption and economic growth. The method of analysis use pooling data. Number of cross-section data are 14 countries and times-series data are nine years. The best model obtained from redundant fixed effect test, correlated random effects-Hausman test and technical consideration. The model is fixed effect model. Based on regression output, corruption have positive significant to 12 Asia Pasific countries economic growth. So, corruption are not become a grease of wheel for that countries. If corruption (corruption perception index/CPI) increase, economic growth increase too. While, another variables like FDI, and government budget for healthy have positive significant to the economic growth. Actually, only five countries in which the CPI variable significantly to economic growth. Two countries have positive significant (Japan and Korea) and another have negative significant (Brunei Darussalam, Timor Leste, and Kamboja).*

*Key words: CPI, economics growth, pooling data, none, fixed, and grease of wheel*

### PENDAHULUAN

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (World Bank dan IMF). Korupsi menjadi sebuah fenomena global yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi. World Bank (2008) memperkirakan bahwa lebih dari

US\$10 milyar atau sekitar 5% dari GDP dunia setiap tahun hilang dikarenakan korupsi. Uni Afrika memperkirakan korupsi di wilayahnya sekitar 25% dari GDP-nya.

USAID menyuarakan hal yang sama bahwa korupsi merusak pembangunan ekonomi. Pada sektor swasta,

korupsi meningkatkan biaya bisnis melalui harga dari suap itu sendiri, biaya manajemen dari negosiasi dengan pejabat dan resiko dari pelanggaran kesepakatan. Meskipun begitu ada beberapa orang mengklaim, bahwa korupsi telah menurunkan biaya dengan adanya pemotongan birokrasi.

Dalam memandang hubungan korupsi dan pertumbuhan ekonomi, para ekonom, sejarawan dan ahli politik telah terlibat dalam debat yang panjang tentang apakah korupsi membahayakan pertumbuhan ekonomi. Pandangan umum menyatakan bahwa korupsi mengganggu aktivitas ekonomi dengan mendistorsi alokasi sumber daya yang efisien dalam perekonomian. Kebanyakan para ekonom memandang bahwa korupsi merupakan penghambat utama pembangunan. Korupsi merupakan salah satu penyebab pendapatan rendah dan memainkan peran penting dalam menimbulkan jebakan kemiskinan (Blackburn et al.; 2006). Mungkin mengherankan, bahwa beberapa orang menganggap bahwa dengan 'meminyaki roda' (*oiling the wheel*) birokrasi, kadang-kadang korupsi dapat juga bermanfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Hasil yang kontras ditunjukkan oleh Tanzi (1998) dan Guriev (2004) yang mengklaim bahwa korupsi dapat menimbulkan biaya birokrasi yang besar.

Kontribusi penting dalam debat ini adalah dari Mauro (1995) yang membangun indeks korupsi untuk 67 negara dan menunjukkan bahwa korupsi berhubungan negatif dengan investasi dan pertumbuhan. Mauro juga menganggap bahwa arah dari hubungan kausalitas adalah korupsi mempengaruhi pertumbuhan, dan bukan sebaliknya. Sedangkan Toke Aidt, Jayasri Dutta dan Vania Sena (2008) menyatakan bahwa peran dari akuntabilitas politik sebagai penentu hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Jika lembaga politik memiliki kualitas yang baik, korupsi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya jika

lembaga politik tersebut kualitasnya rendah maka korupsi tidak berdampak pada pertumbuhan.

Tabel 1 di bawah ini menunjukkan perkembangan korupsi yang diukur dengan menggunakan indeks persepsi korupsi di 14 negara Asia Pasifik. Dimana, semakin tinggi indeks berarti semakin bersih negara tersebut dari korupsi.

Tabel 1. Corruption Perception Index (CPI) 14 Negara-Negara Asia Pasific

No.	Nama Negara	CPI 2010	CPI 2011	CPI 2012
1	New Zealand	9.3	9.5	9.0
2	Singapura	9.3	9.2	8.7
3	Australia	8.7	8.8	8.5
4	Jepang	7.8	8	7.4
5	Brunei	5.5	5.2	5.5
6	Korea Selatan	5.4	5.4	5.6
7	Malaysia	4.4	4.3	4.9
8	China	3.5	3.6	3.9
9	Thailand	3.5	3.4	3.7
10	Kamboja	2.1	2.1	2.2
11	Indonesia	2.8	3	3.2
12	Philipina	2.4	2.6	3.4
13	Timor Leste	2.5	2.4	3.3
14	Papua New Guinea	2.1	2.2	2.5

Sumber: Transparency International

Berdasar Tabel 1 nampak bahwa CPI setiap negara sulit untuk mengalami peningkatan cukup besar. Rata-rata negara tersebut meningkat hanya dalam hitungan beberapa point. Misalnya seperti Indonesia dari tahun 2010-2012 hanya meningkat 0,2 tiap tahun. Demikian pula dengan Korea Selatan, Malaysia maupun China, hanya Philipina yang melonjak cukup besar dari tahun 2011 ke tahun 2012 yaitu dari 2,6 menjadi 3.4. Yang lainnya hanya meningkat sedikit.

Data tersebut juga menunjukkan bahwa kelompok negara yang sangat bersih seperti New Zealand, Singapura, Jepang dan Australia, tiap tahun selalu berada dalam kelompok negara bersih dari korupsi dan sebaliknya negara yang korup juga mengelompok tidak berubah dari posisi semula, seperti Indonesia ataupun Papua New Guinea. Padahal seperti disebutkan di atas, korupsi bisa mengganggu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Walaupun ada juga yang menyatakan sebaliknya bahwa korupsi justru meningkatkan pertumbuhan suatu negara.

Sementara itu, di di Asia Pasifik menunjukkan kondisi ekonomi yang berbeda-beda dan juga tingkat korupsi yang berbeda pula antar negara. Menjadi menarik untuk mengetahui apakah antar 14 negara Asia Pasifik memiliki perilaku yang sama dalam hal pertumbuhan ekonomi dan indeks persepsi korupsinya. Dengan kata lain, apakah korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 14 negara Asia Pasifik.

## **LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Korupsi**

Definisi paling sederhana dari korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok (World Bank dan IMF). Berdasar pandangan hukum, dikatakan korupsi bila memenuhi unsur-unsur: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan unsur terakhir adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Suatu perbuatan dikatakan korupsi diantaranya adalah bila memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuaipan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi bagi pegawai negeri /penyelenggara negara. Secara umum

korupsi adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk kepentingan pribadi. Titik ujung dari korupsi adalah kleptokrasi (pemerintahan oleh para pencuri).

Korupsi terjadi di semua negara, terlepas dari tingkatan sosial dan pembangunan ekonominya. Umumnya, korupsi paling mungkin terjadi ketika sektor publik dan sektor swasta bertemu dan khususnya dimana pejabat publik memiliki tanggung jawab langsung atas ketetapan-ketetapan tentang pelayanan publik atau penerapan regulasi khusus.

Pada dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dimana korupsi dapat menghancurkan proses formal yang sudah dibentuk. Korupsi pada pemilihan umum dan badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pembuatan kebijakan; korupsi pada sistem pengadilan menghentikan ketertiban hukum dan korupsi pada pemerintahan publik menyebabkan ketidakadilan dalam pelayanan pada masyarakat. Korupsi sekaligus juga menurunkan legitimasi pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi.

Di sektor ekonomi, korupsi mempersulit pembangunan ekonomi dimana pada sektor privat, korupsi meningkatkan biaya karena adanya pembayaran ilegal dan risiko pembatalan perjanjian atau karena adanya penyidikan. Meski begitu, ada juga yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi biaya karena mempermudah birokrasi yaitu adanya sogokan menyebabkan pejabat membuat aturan baru dan hambatan baru. Dengan demikian, korupsi juga bisa mengacaukan dunia perdagangan. Perusahaan-perusahaan yang dekat dengan pejabat dilindungi dari persaingan, hasilnya perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien. Dampak negatif lainnya, korupsi telah menimbulkan distorsi pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat dimana sogokan dan upah tersedia lebih banyak.

## **Teori Pertumbuhan Neoklasik**

Di dalam teori pertumbuhan ekonomi, dikenal dua aliran pemikiran yaitu teori neoklasik dan teori modern (Tulus T.H. Tambunan, 2003). Pada teori neoklasik, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah tenaga kerja (*Labor/L*) dan kapital (*capital/K*). Adanya tambahan K dan L dengan asumsi produktivitas masing-masing faktor produksi tetap, maka akan menambah output yang dihasilkan. Persentase pertumbuhan output bisa lebih besar (*increasing return to scale*) bisa lebih kecil (*decreasing return to scale*) atau tetap (*constant return to scale*) dibanding persentase pertambahan input K dan L. Dalam teori ini, peran teknologi dianggap konstan, sehingga teori ini tidak mengenal adanya peningkatan produktivitas.

Teori pertumbuhan neoklasik kurang bisa menjelaskan pertumbuhan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam NICs (*New Industry Countries*) seperti Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura. Adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut menunjukkan pentingnya teknologi dalam peningkatan produktivitas. Jadi bukan hanya input K dan L saja yang penting dalam produksi tetapi juga input teknologi.

## **Teori Pertumbuhan Endogen**

Pada teori pertumbuhan endogen, faktor-faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan selain K dan L juga teknologi, kewirausahaan, bahan baku dan material. Selain itu juga ketersediaan dan kondisi infrastruktur, hukum dan peraturan, stabilitas politik, kebijakan pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional (*term of trade*). Pentingnya faktor-faktor tersebut bisa dilihat dari berbagai kasus yang terdapat di Afrika, khususnya di Sub-Sahara Afrika. Di negara-negara tersebut, pembangunan ekonomi terhenti diantaranya karena kualitas tenaga kerja yang sangat rendah, politik yang tidak stabil, peperangan,

defisit keuangan pemerintah dan keterbatasan infrastruktur.

Dari penjelasan di atas nampak perbedaan antara teori pertumbuhan neoklasik dengan teori pertumbuhan endogen. Pada teori teori pertumbuhan endogen, peran kualitas tenaga kerja lebih penting dari pada kuantitas tenaga kerja. Kualitas tenaga kerja bukan hanya dilihat dari tingkat pendidikan tetapi juga kondisi kesehatannya. Dalam analisis-analisis empiris, peran pendidikan dan kesehatan menjadi variabel yang penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pula dengan kapital, peran kualitas dari capital (kemajuan teknologi) lebih penting dari pada kuantitasnya. Begitu pula dengan peran dari kewirausahaan, termasuk kemampuan untuk melakukan inovasi, menjadi salah satu faktor penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Munculnya teori pertumbuhan endogen disebabkan adanya kelemahan pada teori pertumbuhan neoklasik. Model pertumbuhan ini, memasukkan aspek-aspek endogenitas dan eksternalitas di dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu asumsinya adalah variabel teknologi tidak lagi tetap melainkan bersifat dinamis. Begitu pula halnya dengan tenaga kerja (L). Variabel L tidak lagi merupakan variabel eksogen, tetapi bisa berkembang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kemajuan iptek dan sumber daya manusia menjadi sumber peningkatan produktivitas dari input-input yang digunakan dalam proses produksi.

## **Korupsi dan Pertumbuhan**

Banyak tulisan akademik yang memberikan kepercayaan pada kebijakan pembangunan dalam mengatasi korupsi. Berdasar teori Sheifer dan Vishny (1993), menyatakan, misalnya, ketika sebuah proyek perlu mendapat izin dari banyak orang, dimana masing-masing mempunyai kekuasaan untuk memveto, maka biaya korupsi meningkat dan pertumbuhan

ekonomi menurun. Myrdal (1968) mengatakan bahwa pejabat yang korupsi bisa menggunakan kekuasaannya untuk menunda dan menghalangi suatu proyek sehingga dia bisa mendapatkan suap yang lebih banyak. Krueger (1974) yang mewakili studi klasik tentang ketidakefisienan *rent-seeking* melalui korupsi dengan pembatasan perdagangan. Korupsi semacam itu, *de facto* lingkungan kelembagaan akan lebih membatasi aktivitas ekonomi dari pada secara *de jure*.

Tetapi ada juga yang beralasan bahwa korupsi menjadi baik bagi pertumbuhan ekonomi. Lui (1985) menunjukkan bahwa korupsi dapat memperpendek daftar waktu tunggu. Penundaan oleh birokrat yang memperlambat urusan bisnis menyebabkan pebisnis dan konsumen terhalangi untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangan, pejabat yang korup dapat memanfaatkan hal ini dengan memperlancar segala sesuatu dengan suap tentunya, sehingga akhirnya mendorong pertumbuhan. Segi positif dari korupsi menjadikan pertumbuhan maksimal di negara-negara yang peraturannya relatif efisien karena menurunnya korupsi akan meningkatkan biaya untuk mengeliminasi semuanya, seperti kejahatan pada umumnya (Klitgaard;1988). Colombatto (2003) juga menganalisis korupsi secara teoritis dengan berbagai lingkungan kelembagaan yang berbeda dan menemukan bahwa dalam beberapa kasus, korupsi dapat menjadi efisien di negara maju sebagaimana di negara totaliter.

### Penelitian Terdahulu

Penelitian Mushfiq Swaleheen dan Dean Stansel (2007) tentang *Economic Freedom, corruption and growth* dengan data panel 60 negara, menunjukkan bahwa korupsi mempengaruhi pertumbuhan secara tidak langsung dengan intermediasi *economic freedom*. Negara-negara dengan *economic freedom* yang rendah maka korupsi mengurangi pertumbuhan ekonomi, dan sebaliknya jika *economic*

*freedom* tinggi maka korupsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Boris Podobnik, Jia Shao; Djuro Njavro, Plamen Ch. Ivanov dan H.E. Stanley (2008) tentang *influence of corruption on economic growth rate and foreign investment*, studi kasus 121 negara periode 1999-2004. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan CPI satu unit menyebabkan kenaikan tingkat pertumbuhan GDP per kapita 1,7%. Khusus di Eropa, kenaikan CPI dengan satu unit meningkatkan pertumbuhan GDP per kapita 2,4%.

Gbewopo Attila (2008) tentang *corruption, taxation and economic growth: theory and evidence*. Dalam pertumbuhan endogen, korupsi ada dua cara yaitu korupsi dalam pengeluaran publik dan korupsi dalam penerimaan publik. Korupsi bukan hanya mempengaruhi tingkat pajak tetapi dapat juga mendistorsi, yang menyebabkan tingkat pajak berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan. Lebih korupnya suatu negara maka lebih kuat efek negatif dari pajak terhadap pertumbuhan.

Toke Aidt, Jayasri Dutta; Vania Sena (2008) tentang *Governance Regimes, corruption and growth: theory and evidence*, studi kasus negara-negara seluruh dunia. Di dalam rezim dengan kualitas lembaga politik tinggi, korupsi berpengaruh negatif tetapi jika kualitas lembaga politik rendah, korupsi tidak mempengaruhi pertumbuhan.

Kwabena Gyimah Brempong (2002): *corruption, economic growth and income, inequality in Africa: data panel* negara-negara Afrika. Kenaikan satu unit korupsi menurunkan tingkat pertumbuhan GDP dan pendapatan per kapita antara 0,75 dan 0,9 point persen dan antara 0,39 dan 0,41 point persen per tahun. Korupsi lebih melukai kaum miskin dibanding kaum kaya di Afrika.

Zwika Neeman, M. Daniele Paserman, Avi Simhon (2008): *Corruption*

*and openness*. Hubungan antara korupsi dan pertumbuhan tergantung derajat keterbukaan ekonominya. Pada perekonomian terbuka, korupsi berhubungan negatif dengan GNP per kapita tetapi pada perekonomian tertutup tidak ada hubungan antara keduanya.

Jack C Heckelman dan Benjamin Powell (2010): *Corruption and the institutional environment for growth*. Hasilnya menunjukkan bahwa korupsi mendorong pertumbuhan ekonomi ketika *economic freedom* banyak dibatasi tetapi manfaat dari korupsi turun seiring meningkatnya *economic freedom*. Ditemukan juga efek bermanfaat dari korupsi yang segera hilang ketika ukuran pemerintahan dan regulasi yang luas diturunkan.

## METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dunia karena penelitian ini bisa diterapkan di negara manapun. Dalam penelitian ini digunakan sampel negara-negara Asia Pasifik 2002-2011 dengan menggunakan data tahunan.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *World Data Bank* dan *Transparency International*.

### Definisi Operasional Variabel

1. Korupsi: menggunakan indeks persepsi korupsi yaitu CPI (*corruption Perception Indeks*) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* dengan skor 0 sampai dengan 10. Skor 10 berarti suatu wilayah bebas dari korupsi dan sebaliknya jika nol maka semakin korup (indeks).
2. Pertumbuhan ekonomi: GDP riil yang terjadi setiap tahun (jutaUS\$).
3. Investasi: jumlah penanaman modal asing langsung atau *foreign direct investmen* (FDI) (juta US\$).

4. Pengeluaran pendidikan: Jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pendidikan (juta US\$).
5. Pengeluaran Kesehatan: jumlah anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan (juta US\$)
6. Pertumbuhan populasi: menggunakan tingkat pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahun (%)

### Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan data panel (*pooled data*) yang menggabungkan data *cross section* dan *time series*. Model dasar dari penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{CPI}_{it} + \beta_2 \text{FDI}_{it} + \beta_3 \text{PP}_{it} + \beta_4 \text{PK}_{it} + \beta_5 \text{Pop}_{it} + \varepsilon_{it}$$

Untuk  $i = 1, 2, 3, \dots, 33$  dan  $t = 1, 2, 3, \dots, 10$

Dimana:

$i$  = data cross section

$t$  = data time series

$Y$  = GDP riil (juta US\$)

CPI = indeks korupsi (indeks)

FDI = total investasi langsung asing (juta US\$)

PP = jumlah anggaran pemerintah untuk sektor pendidikan (juta US\$)

PK = jumlah anggaran untuk sektor kesehatan (juta US\$)

Pop = tingkat pertumbuhan populasi (%)

$\varepsilon$  = *disturbance error*

### Hipotesis

1. Korupsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Variabel-variabel investasi, pengeluaran untuk pendidikan, pengeluaran untuk kesehatan, dan populasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

## Metode Analisis

Data panel adalah sebuah set data yang berisi data sampel individu yang menggabungkan antara data *cross section* dan *time series*. Data panel bisa menjadi sangat bermanfaat karena ia memungkinkan peneliti untuk mendalami efek ekonomi yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan data *cross section* saja atau data *time series* saja. Dengan mengakomodasi informasi baik yang terkait dengan variabel-variabel *cross section* maupun *time series*, data panel secara substansial mampu menurunkan masalah *omitted-variables*; model yang mengabaikan variabel yang relevan. Data panel juga bisa berguna untuk alasan teknis-pragmatis, yaitu terkait dengan ketersediaan data. Dengan menggabungkan data *time series* dan *cross section*, kita akan mampu menambah jumlah observasi secara signifikan tanpa melakukan *treatment* apapun terhadap data. Oleh karenanya, data panel mungkin memberikan penyelesaian yang memuaskan.

Dalam analisis model data panel dikenal tiga macam pendekatan estimasi yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least squares*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*).

Pendekatan pertama, menggabungkan seluruh data *cross section* dan *time series*, kemudian mengestimasi model dengan menggunakan metode OLS (*ordinary least squares*) sehingga disebut pendekatan kuadrat terkecil (*pooled least square*). Pendekatan kedua, memperhitungkan kemungkinan bahwa kita menghadapi masalah *omitted variables* dimana *omitted variables* mungkin membawa perubahan pada intercept *time-series* atau *cross section*. Model ini menambahkan *dummy variables* untuk memungkinkan adanya perubahan *intercept*. Pendekatan ketiga, memperbaiki efisiensi proses *least squares* dengan memperhitungkan *error* dari *cross section*

dan *time-series*. Model ini adalah variasi dari estimasi *generalized least squares*.

### 1. Pendekatan Kuadrat terkecil

Pada pendekatan ini, estimasi model persamaan yang paling sederhana adalah mengabaikan dimensi *cross-section* dan *time series* dari data panel dan mengestimasi data dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS) yang diterapkan dalam data yang berbentuk *pool*. Jadi, misalnya ada 33 data *cross section* dan 10 tahun periode waktunya, maka data tersebut disusun secara berurutan, sehingga didapatkan 330 observasi untuk setiap variabel dalam model.

### 2. Pendekatan Efek Tetap (Fixed Effect)

Istilah *fixed effect* didapat dari kenyataan bahwa walaupun *intercept* mungkin berbeda antar individu, namun *intercept* tersebut tidak bervariasi sepanjang waktu; dengan kata lain ia adalah *time invariant*. Selain itu FEM (*fixed effect model*) berasumsi bahwa koefisien dari regresor tidak bervariasi baik antar waktu maupun antar individu.

### 3. Pendekatan Efek Acak ( Random Effect Model/ REM)

Perbedaan mendasar FEM dan REM adalah mengenai asumsi *unobservable individual effect* ( $\mu_i$ ). Jika di dalam FEM,  $\mu_i$  diasumsikan berkorelasi dengan regresor (X), maka dalam REM,  $\mu_i$  diasumsikan tidak berkorelasi dengan regresor X atau dengan kata lain  $\mu_i$  diasumsikan bersifat random. Inilah ide dasar dari model REM.

### 4. Pemilihan Model Estimasi antara FEM dan REM

Untuk menentukannya, maka pertama, terpulang pada asumsi yang kita buat tentang korelasi antara *cross section error component*  $\mu_i$  dan regresor X. Jika diasumsikan bahwa  $\mu_i$  dan regresor X adalah *uncorrelated* maka, REM lebih tepat digunakan dalam model. Akan tetapi jika diasumsikan bahwa  $\mu_i$  dan regresor X adalah *correlated*, maka FEM lebih tepat.

Kedua, jawaban terpulung pada sampel dari penelitian. REM mengasumsikan bahwa  $\mu_i$  diambil secara random dari populasi yang jauh lebih besar. Seringkali hal ini sulit dipenuhi. Misal, jika kita meneliti tingkat kriminalitas antar 50 negara bagian di AS, maka asumsi bahwa 50 negara bagian adalah sampel jelas tidak terpenuhi. Dalam kasus ini, berarti REM tidak tepat untuk digunakan sebagai model.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini digunakan *pooling data*, dimana data *cross-section*

Tabel 2. Berbagai Kemungkinan Test Perbandingan Metode Estimasi

		Cross-Section		
		None	Fixed Effect	Random Effect
P e r i o d	None	Standard	Redundant Fixed Effect Test: signifikan	Correlated Random Effect – Hausman Test: Tidak signifikan
	Fixed Effect	Redundant Fixed Effect Tests: Tidak Signifikan	Redundant Fixed Effect Tests: signifikan	Mixed Fixed & Random Effect not allowed with imbalance data
	Random Effect	Correlated Random Effect – Hausman Test: Tidak Signifikan	Mixed Effect & Random Effect not allowed with imbalancedata	Two-way random effect not allowed with imbalanced data

Hasil test perbandingan metode estimasi bahwa jika *cross-section* adalah *fixed* dan *period* adalah *none*, maka dengan menggunakan *redundant fixed effect test* menunjukkan signifikan artinya bahwa *none* lebih baik dari pada *fixed effect model (FEM)*. Jika *cross-section* adalah *random effect* dan *period*-nya *none* dan hasil testnya tidak signifikan maka lebih baik menggunakan model REM. Tetapi jika *cross-section* adalah *none* dan *period* adalah *fixed effect model* maka lebih baik menggunakan *fixed effect model* karena

terdiri dari 14 negara di Asia Pasifik dan data *time series* dimulai tahun 2003-2011. Akan tetapi setelah data diolah dengan menggunakan Eviews, ada dua negara yaitu Cina dan Papua New Guini yang didrop otomatis oleh Eviews karena data tidak lengkap.

## Uji Spesifikasi Model

Sebelum melakukan estimasi mengenai hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan penentuan tentang model mana yang akan dipakai untuk mengestimasi.

hasil test tidak signifikan dan hal ini didukung oleh hasil test antara *cross-section* dan *period* yang sama-sama *fixed effect* dan hasil testnya tidak signifikan. Untuk *cross-section* adalah *none* dan *period* adalah *random effect* hasilnya tidak signifikan berarti menggunakan REM. Dengan demikian, model yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian tidak bisa dipastikan apakah FEM atau REM. Oleh karena itu, penentuan model didasarkan pada pertimbangan teknis yaitu jika N (jumlah unit *cross-section*) besar

dan  $T$  (*jumlah unit time-series*) kecil, maka hasil estimasi kedua pendekatan dapat berbeda signifikan. Bila yakin bahwa unit *cross-section* yang dipilih dalam penelitian diambil secara acak, maka REM harus digunakan. Tetapi bila meyakini bahwa unit *cross-section* yang dipilih tidak diambil acak maka harus menggunakan FEM. Pada penelitian ini, sampel diambil secara tidak acak tetapi dipilih berdasar negara-negara yang sudah dikenal secara luas sehingga dalam penelitian ini digunakan *Fixed Effect Model* (FEM).

### Analisis Hasil Regresi

Hasil regresi dengan menggunakan FEM menunjukkan bahwa jika yang di-*fixed*-kan adalah *period*, maka pada masing-masing periode waktu terdapat *intercept* yang berbeda antar waktu. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di 12 negara Asia Pasifik terjadi pada tahun 2004 diikuti tahun 2003 kemudian disusul tahun 2008. Hal itu bisa terjadi karena imbas dari memburuknya perekonomian negara-negara Eropa. Adanya keterbukaan ekonomi menyebabkan peristiwa yang dialami suatu negara yang transaksi perdagangan internasionalnya besar akan berdampak pada negara-negara lainnya, terutama yang memiliki hubungan dagang dengan negara tersebut.

Jika yang di-*fixed*-kan adalah *cross-section* maka pertumbuhan ekonomi tertinggi dialami negara Jepang diikuti Korea Selatan, baru disusul Indonesia. Melihat perkembangan perekonomian dunia akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perekonomian Korea Selatan menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Banyak barang yang dahulu dikuasai oleh Jepang, sekarang mulai dikuasai Korea Selatan, misalnya industri elektronik maupun industri hiburan, sedangkan industri otomotif mulai memperlihatkan gejala yang sama.

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK/CPI) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di 12 negara-negara Asia Pasifik

dengan koefisien CPI sebesar 96,50055. Hal itu berarti bahwa jika CPI meningkat sebesar satu point indeks maka pertumbuhan ekonomi (GDP riil) 12 negara Asia Pasifik akan meningkat sebesar 96,5 juta US\$ dan sebaliknya jika semakin korup atau CPI semakin menurun, maka perekonomian negara-negara tersebut juga akan semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintahan negara-negara tersebut (Australia, Indonesia, Brunei Darusalam, Kamboja, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Timor Leste, dan Vietnam) harus menjaga dan membersihkan negaranya dari praktek-praktek korupsi sehingga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bisa tercapai.

Hasil regresi juga memperlihatkan bahwa investasi asing langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi 12 negara Asia Pasifik dengan koefisien FDI sebesar 0,001203. Artinya, jika FDI meningkat sebesar satu juta US\$ maka pertumbuhan ekonomi (GDP riil) 12 negara-negara tersebut akan meningkat sebesar 0,001203 juta US\$ dan sebaliknya. Dengan demikian, jika negara-negara tersebut menginginkan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan berkelanjutan maka mereka harus berusaha sedemikian rupa agar investor asing bersedia menanamkan modalnya secara langsung di negara-negara mereka. Karena banyak negara yang memperebutkan modal asing untuk pertumbuhan ekonominya, maka pemerintah harus memiliki strategi yang bagus dan inovatif agar mudah menarik investor asing. Masuknya modal asing ke suatu negara akan menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia akan bertambah banyak sehingga pemerintah mampu menurunkan pengangguran. Apabila hal itu betul-betul terjadi maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

Salah satu variabel yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia yaitu pengeluaran pemerintah

untuk kesehatan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut dengan nilai koefisiennya sebesar 17,78435. Artinya, jika anggaran pemerintah untuk kesehatan ditingkatkan sebesar satu juta US\$ maka pertumbuhan ekonomi (GDP riil) negara tersebut akan meningkat sebesar 17,78435 juta US\$ dan sebaliknya jika anggaran tersebut diturunkan maka kualitas sumber daya manusia akan menurun sehingga kemampuan produksi akan menurun, akibatnya pertumbuhan ekonomi juga akan menurun. Sekalipun suatu negara hanya memiliki sedikit sumber daya alam seperti Jepang misalnya, tetapi karena negara tersebut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka wajar kalau Jepang menjadi negara yang luar biasa. Di saat negara-negara Asia masih terpuruk, Jepang menjadi negara yang diperhitungkan oleh negara-negara maju karena kualitas sumber daya manusianya yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah harus berani menyediakan dana yang besar untuk kesehatan masyarakatnya agar mereka menjadi sehat sehingga menjadi lebih produktif. Produktifitas yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi juga.

### **Analisis Hubungan Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi**

Untuk menganalisis lebih jauh tentang hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi di 12 negara Asia Pasifik maka perlu dilakukan regresi dengan *cross section specific coefficient* berupa CPI, karena fokus dari penelitian ini adalah mengenai korupsi yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel CPI ternyata hanya signifikan di lima negara.

Dari lima negara yang CPI-nya signifikan, ternyata hanya Jepang dan Korea yang menunjukkan hubungan yang positif antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Jadi, yang sebenarnya

mendominasi hasil dari 12 negara Asia Pasifik adalah Jepang dan Korea Selatan dengan koefisien lebih tinggi diperoleh Jepang. Pengaruh Jepang tidak dapat diragukan lagi dalam perekonomian negara-negara Asia Pasifik. Seperti diketahui, CPI Jepang dibanding 11 negara lainnya adalah tertinggi ketiga setelah Singapura dan Australia yaitu sekitar 7-8. Hal itu berarti bahwa perekonomian Jepang adalah terbersih ketiga dibandingkan negara-negara lainnya. Korea Selatan juga termasuk cukup bersih dari korupsi dengan indeks sekitar 5-6. Korea Selatan menjadi negara maju sekarang ini, bahkan bisa jadi menggantikan posisi Jepang suatu saat nanti, karena perkembangan industri elektronik dan industri hiburan yang mulai menggeser posisi Jepang. Keduanya juga mendorong 10 negara Asia pasifik lainnya untuk menjadikan korupsi bukan lagi sebagai *grease of wheel*, sehingga kalau negara-negara tersebut menginginkan pertumbuhan ekonominya berkelanjutan maka harus melakukan pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya.

Tiga negara lainnya yang negatif signifikan adalah Brunei Darussalam, Timor Leste dan Kamboja. Ketiganya harus betul-betul hati-hati dalam mengambil kebijakan terkait korupsi karena jangan sampai pemberantasan korupsi yang dilakukan justru memperparah pertumbuhan ekonomi mereka. Kalau korupsi terjadi akibat birokrasi yang terlalu panjang dan dengan adanya suap, para pembuat kebijakan bisa mempercepat proses birokrasi (memperpendek waktu tunggu investor) maka pemerintah harus melakukan upaya penyederhanaan birokrasi agar tidak ada lagi suap dalam proses perijinan. Sekalipun tiga negara tersebut signifikan tetapi pengaruhnya tidak dominan karena hasil secara umum positif signifikan. Jadi bisa dikatakan bahwa semakin bersih suatu negara dari korupsi, maka akan semakin tinggi GDP riil negara tersebut.

## Kesimpulan dan Saran

Hasil estimasi menunjukkan bahwa CPI berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada 12 negara Asia Pasifik. Dengan demikian korupsi bukan menjadi *Grease of Wheel* atau korupsi tidak menjadi pelicin bagi roda perekonomian. Analisis lebih jauh menunjukkan bahwa hanya lima negara yang sebenarnya memiliki CPI yang signifikan. Tetapi yang dominan mempengaruhi hasil di 12 negara Asia Pasifik adalah Jepang dan Korea Selatan.

Kelemahan dari penelitian ini adalah datanya yang *imbalance* dan jumlah obyeknya yang kurang banyak sehingga hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya yang terkait dengan korupsi dan pertumbuhan ekonomi bisa menutup kelemahan dari hasil penelitian ini.

## Referensi

Agus Sugiyono, 2001, Model Pertumbuhan Neoklasik: Penerapannya Untuk Pertumbuhan Regional Di Indonesia, *Makalah Ekonomi Regional*, Universitas gadjah Mada.

Boris Podobnik; Jia Shao; Djuro Njavro; Plamen dan H. E. Stanley, 2008, Influence of Corruption on Economic Growth Rate and Foreign Investment, *The European Physical Journal*, B 63, 547-550, EDP Sciences.

Dzhumashev, Ratbek, 2009, Is There A Direct effect of Corruption on Growth?, *MPRA Paper* No. 18489, Monash University, Dept. of economics.

Gbewopo Attila, 2008, Corruption, Taxation and Economic Group: Theory and Evidence, CERDI, Etudes et Document, E 2008.218.

Huntington, Samuel P., 1968, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University Press.

JAC C. Hackelman & Benjamin Powell, 2010, Corruption and The Institutional Environment for Growth, *JEL Clasification: D73, H10, 043,057*.

Kaufmann, D.; Kraay, A.; and Zoido-Lobaton, P., 1999, *Government Matters*, World Bank Working Paper No. 2196.

Keith Blackburn; Niloy Bose; and M. Emranul Haque, 2005, *Economic Discussion Paper EDP-0530*, The University of Manchester.

Kwabena Gyimah-Brempong, 2002, Corruption, Economic Growth, and Income Inequality in Africa, *Economic of Governance (2002) 3: 183-209*, Department of Economics, University of South Florida.

Lui, Francis, 1985, An Equilibrium Queuing Model of Bribery, *Journal of Political Economy*, August, 93(4): 760-781.

Mauro, Paolo, 1995, Corruption and Growth, *Quarterly Journal of Economic*, 110: 681-712.

Mauro, Paolo, 2004 The Persistence of Corruption and Slow Economic Growth, *IMF Staff Paper Vol. 51, No. 1*, International Monetary Fund.

Mendez, F., Sepulveda, F., 2006, Corruption, Growth and Political Regimes: Cross-Country Evidence, *European Journal of Political Economy* 22 (1), 82-98.

- Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2000, *Pembangunan Ekonomi*, Erlangga.
- Mushfic us Swaleheen and Dean Stansel, 2007, Economic Freedom, Corruption, and Growth, *Cato Journal Vol. 27, No. 3*, Cato Institute.
- Osterfeld, D., 1992, *Prosperity Versus Planning: How Government Stifles Economic Growth*, Oxford University Press, New York.
- Petter Langseth; Rick Stapenhurst; and Jeremy Pope, 1997, The Role of a National Integrity System in Fight Corruption, *The Economic Development Institute of the World bank*.
- Ratbek, Ratbek, 2010, Nonlinier Effect of Corruption, Uncertainty, and Growth, *Munich Personal PePEc Archive MPRA Paper No. 24834*, Department of Economics, Monash University.
- Shang-Jin Wei, 1998, *Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle?*, Harvard University and National Bureau of Economic Research
- Toke Aidt; Jayasri Dutta; and Vania Sena, 2008, Governance Regimes, Corruption and Growth: Theory and Evidence, *Journal Comparative Economics 36 (2008) 195-220*, Elsevier Inc.
- Toke S. Aidt, 2009, Corruption, Institutions and Economic Development, *JEL Codes: D78, D82*
- Tulus T.H. Tambunan, 2003, *Perekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Ghalia Indonesia.
- Zvika Neeman; M. Daniele Paserman; and Avi Simhon, 2008, *The B.E. Journal of Economic Analysis & Policy*, Vol. 8, Issue 1 Article 50, Berkeley Electronic Press.